

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Transparansi Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Rafae”, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa telah dilakukan namun belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa telah berupaya menyediakan informasi melalui papan informasi anggaran, musyawarah desa, serta penyampaian laporan kegiatan. Namun, keterbukaan informasi ini belum sepenuhnya merata karena terdapat warga yang tidak memperoleh informasi secara langsung, dan penyampaian dokumen seperti RKPDDes dan APBDes belum dipahami oleh seluruh masyarakat secara utuh. Selain itu, aksesibilitas informasi juga masih terbatas karena sebagian masyarakat hanya mengetahui informasi berdasarkan pemberitahuan lisan, sementara media publikasi belum digunakan secara maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Dana Desa juga masih menghadapi kendala. Musyawarah desa memang dilakukan, tetapi pelibatan warga sering kali didominasi oleh tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa, sehingga masyarakat umum termasuk perempuan dan pemuda kurang mendapat ruang untuk menyampaikan pendapat. Masalah distribusi informasi mengenai jadwal musyawarah yang tidak merata menjadi

penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi menurut indikator Sedarmayanti—keterbukaan informasi, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat—belum terpenuhi sepenuhnya, sehingga perlu peningkatan dalam sistem penyampaian informasi dan mekanisme pelibatan masyarakat.

6.2 Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya pemerintah desa untuk memperkuat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa Rafae perlu memperluas pemanfaatan media informasi publik, memperjelas penyampaian dokumen anggaran, serta memastikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat diakses secara merata oleh seluruh warga. Selain itu, mekanisme musyawarah desa perlu dibuat lebih inklusif dengan memberi ruang berbicara yang sama kepada semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan dapat lebih proaktif dalam mencari informasi, menghadiri musyawarah, dan memberikan masukan agar transparansi dapat terwujud melalui partisipasi aktif seluruh pihak.

a. Saran bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Rafae perlu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dengan menyediakan media publikasi yang lebih variatif, seperti papan pengumuman yang diperbarui secara rutin, penyebaran informasi melalui

kelompok masyarakat, atau penggunaan media digital apabila memungkinkan. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa undangan musyawarah desa disampaikan secara merata kepada seluruh warga, bukan hanya kepada tokoh tertentu. Selain itu, penyampaian informasi mengenai RKPDes, APBDes, serta laporan realisasi anggaran harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pemerintah desa juga perlu memberikan ruang diskusi yang lebih terbuka dan adil dalam musyawarah sehingga semua warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat.

b. Saran bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Rafae diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses pembangunan desa dengan aktif mengikuti musyawarah, memberikan masukan, serta turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Warga juga perlu secara proaktif mencari informasi yang telah disediakan oleh pemerintah desa agar tidak hanya bergantung pada pemberitahuan lisan. Selain itu, masyarakat perlu membangun sikap kritis namun konstruktif dalam menilai penggunaan anggaran desa, sehingga transparansi dapat terwujud melalui partisipasi publik yang kuat dan terorganisir.